

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN DINAMIKA RUANG KEBANGSAAN

Muh. Sain Hanafy

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Email: mshanafy62@gmail.com

Abstrak: multikulturalisme dapat dipandang sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Agama-agama muncul dalam sebuah fase formatif yang ditandai oleh upaya untuk merumuskan ajaran-ajaran dan pendidikan yang dirasa cocok dengan tantangan yang muncul saat itu. Munculnya berbagai macam agama dapat menjadi pemicu munculnya konflik, ketika masing-masing pemeluk agama mengaggap merak yang paling benar. Persoalan tersebut bisa menjadi problem laten dan sukar dicari jalan keluarnya. Dalam konteks ini, kesadaran akan multikulturalisme atau pluralisme lalu menjadi nilai yang sangat penting. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk masyarakat atau khususnya peserta didik untuk memiliki rasa saling menghargai dan memahami. Kenyataannya, perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

Keywords; Pendidikan –Multikultural – Sosial – Sekolah

I. Pendahuluan

Salah satu wacana yang merebut ruang-ruang perjumpaan gagasan di Indonesia – setidaknya sejak runtuhnya rezim politik Orde Baru pada 1998 – adalah ide tentang pluralisme dan multikulturalisme. Secara simplistis, multikulturalisme dapat dipandang sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Tidak mengherankan apabila tokoh politik dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya monumentalnya yang mengandaikan relasi antara demokrasi dan pendidikan (Tilaar, 2004: 1790).

Indonesia adalah sebuah bangsa yang plural dan multikultural. Di dalam penelitian etnologis misalnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta kebudayaannya yang berbeda-beda. Selain dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus 2000 tercatat 101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga Negara (Suryadinata cs, 2003: 102).

Tak sedikit peneliti yang mengandaikan Indonesia sebagai sebuah *melting pot* dan sekaligus super market yang ramai bagi pengaruh agama-agama dunia. Agama-agama dunia datang silih berganti. Satu menggantikan yang lain, tetapi dalam arti tertentu juga ada semacam pola amalgamasi: baik antar sesama agama dari luar maupun antara agama luar dengan tradisi agama lokal. Dari catatan sejarah, tampak bahwa pola hubungan antar agama di masa lalu yang jauh sangat dipengaruhi oleh politik *stelsel* dan politik keagamaan pemerintah kolonial. Masing-masing pihak dibiarkan dalam sebuah hubungan anti-tesis, persaingan dan ketegangan. Syakwasangka dan sikap ignoran sengaja disulut demi kepentingan politik kolonial. Pemerintah kolonial melakukan politik keagamaan yang hanya bersumbu pada dogma dan bukan pada etika; pada ajaran dan bukan pada perilaku. Akibatnya, kehidupan agama bercorak eksklusif dan kehilangan inspirasi yang segar bagi umat dan masyarakat untuk menuntut perbaikan nasib. Agama boleh menjadi apa saja asal tidak menjadi agama pencerahan atau agama pembebasan. Oleh elit penguasa kolonial, komunikasi antar-agama dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak berjalan secara bebas dan terbuka. Pada saat itu agama telah kehilangan “daya dobrak psikologis” atau *psychological striking force* untuk sebuah perubahan yang lebih baik.

Sejak abad 19, agama-agama muncul dalam sebuah fase formatif yang ditandai oleh upaya untuk merumuskan ajaran-ajaran dan pendidikan yang dirasa cocok dengan tantangan yang muncul saat itu. Terjalannya hubungan dengan pusat-pusat keagamaan di luar negeri menyebabkan munculnya gerakan purifikasi agama. Ortodoksi lalu menjadi ciri yang menonjol. Sebut saja misalnya, kekristenan menjadi identik Barat, begitu pula Islam lebih berkiblat ke Tanah Arab, Hindu ke India, dan Budha ke Srilangka atau Thailand. Proses purifikasi ini sering pula dimuati oleh masalah-masalah luar – baik berupa problem historis maupun teologis – ke dalam negeri. Pada gilirannya, problem-problem impor tersebut bisa menjadi problem laten dan sukar dicari jalan keluarnya. Sekedar contoh, stigma sejarah yang pahit tentang Perang Salib turut mengemuka juga di Indonesia. Dendam sejarah, kebencian dan permusuhan bisa muncul kembali ketika cerita tentang perang yang berjalan selama berabad-abad itu dibaca dalam konteks pemahaman yang salah. Begitu pula perang yang terjadi antara golongan Protestan dan Katolik di sejarah Eropa bisa pula menimbulkan trauma yang sama serta menimbulkan kembali prasangka keagamaan yang negatif.

Dalam konteks ini, kesadaran akan multikulturalisme atau pluralisme lalu menjadi nilai yang sangat penting. Kendati demikian, secara dini perlu agaknya kita membedakan dua persitilahan yang memiliki kemiripan: “pluralitas” dan “pluralisme.” Sebab tak sedikit kalangan acap kali mengacaukan penggunaan dua persitilahan tersebut. Pluralitas adalah sebuah fakta tentang kepelbagaian yang ada secara alami dan berdasarkan hukum alam: ras, warna kulit, suku, agama, budaya, jenis kelamin dan seterusnya. Pluralitas, karena itu, bukanlah sebuah pilihan tapi anugerah Tuhan bagi manusia. Itu sebab, tak ada yang salah dalam pluralitas. Persoalannya kemudian: bagaimana seseorang menyikapi kepelbagaian itu? Rumusan jawab terhadap pertanyaan itulah kelak melahirkan pluralisme. Karena itu, pluralisme di sini tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukannya pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme (*to keep to fanaticism at bay*). Sebaliknya, pluralisme – seperti digambarkan secara amat baik oleh Nurcholish Madjid (1999:7) – mesti dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*geniune engagement of diversities within the bonds of civility*). Karena itu, pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan, bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau kepelbagaian itu. Dalam konteks teologi lintas-agama misalnya, pluralisme membangun sebuah postulat: bahwa dalam jantung semua agama dan tradisi otentik mempunyai pesan *kebenaran* yang sama yakni kita semua berasal dan akan kembali kepada satu tujuan yang sama: kepada *Yang Absolut, Yang Awal-Yang Akhir, Yang Hollygius* atau dalam teologi disebut sebagai Tuhan (Sabri:2012, 25).

Akan tetapi dalam konteks kebangsaan kita, belakangan ini pluralisme menjadi terancam dan keutuhan bangsa sebagai *nation* pun terkoyak-koyak – menyusul sejumlah fakta kerusuhan sosial yang membara di sejumlah kota di tanah air – ditengarai karena dipicu oleh masalah SARA (suku, agama, ras, dan atargolongan) yang sangat kompleks. Terlepas dari berbagai analisis tentang apakah akar-akar konflik sosial itu terletak pada wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis atau agama, namun aspek terakhir diyakini sementara pihak sebagai faktor yang paling sensitif memicu kerusuhan tersebut. Karena itu, ketika pluralisme tidak lagi dihargai banyak orang di Indonesia, maka muncul sebuah pertanyaan mendasar: apa sesungguhnya yang salah dengan – dan dalam – sistem sosial-budaya kita? Apakah sistem sosial-budaya selama ini telah tidak lagi mampu menghadapi gerak evolusioner perubahan sosial yang demikian cepat? Atau dalam tataran yang lebih teknis: apakah sistem sosial kita – khususnya sistem pendidikan kita – tidak memiliki ruang yang cukup bagi tumbuhnya semangat pluralisme dan multikulturalisme? Lalu, model pendidikan yang bagaimanakah yang mampu menumbuhkan sikap menghargai pluralisme dan multikulturalisme? Melalui pendidikan: nilai-nilai

apakah yang relevan dikenalkan dan pada urutannya ditumbuhkan pada peserta didik agar mereka mengapresiasi pluralisme? Adakah kemungkinan perumusan ulang kurikulum pendidikan nasional yang mendorong tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai pluralisme? Sesungguhnya sederetan pertanyaan masih dapat dihadirkan untuk memperpanjang masalah pluralisme ini. Tetapi karena keterbatasan ruang dan pertimbangan fokus kajian, maka pertanyaan-pertanyaan di atas dipandang dapat mewakili permasalahan yang sementara dikaji.

Satu hal yang tak terbantah bahwa paradigma pendidikan formal – baik di tingkat dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi – sejauh ini cenderung mengabaikan kemungkinan terbukanya secara luas ruang-ruang dialog tentang kepelbagaian. Hal tersebut dapat disaksikan terutama karena minimnya pesan-pesan pluralisme dan multikulturalisme dalam kurikulum yang ada. Akibatnya, peserta didik dengan sendirinya tidak terlatih untuk mendiskusikan tema-tema penting kebinekaan – seperti etnis, ras, agama, golongan dan seterusnya – yang justru belakangan menjadi pemicu potensial konflik dan kerusuhan seperti terlihat pada luka-luka sosial yang ditinggalkannya.

Oleh karena itu, mengharap sumbangan dari pendidikan paradigma lama tersebut agar dapat mendorong tumbuhnya sikap pluralis dapat kita bilang sebagai ilusi belaka atau *muspro*. Fenomena tersebut justru menjadi paradigma dominan dalam upaya pengembangan agama di masa rezim Orde Baru: tidak mendidik dan mencerahkan masyarakat, sebaliknya justru menumbuhkan kekerdilan dan mentalitas bangsa yang culas. SARA bukannya diterima sebagai anugerah Tuhan tentang kepelbagaian, tapi malahan menjadi bingkai pemicu konflik dan penebar kebencian di kalangan masyarakat. Parahnya, dunia pendidikan – terutama bila mencoba menelaah kurikulum dan silabi yang diberlakukannya – sangat tidak kondusif bagi terciptanya suasana dialogis dan mendorong pluralisme, demokratis dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Sementara dalam kehidupan sosial juga telah terbangun stigma tentang SARA yang cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan negatif. Akibatnya, kendati pun terdapat upaya-upaya penanganan dan penyelesaian konflik sosial yang demikian akut, terutama karena dipicu oleh isu SARA – baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah – tapi terkesan artifisial dan formal, sehingga tidak mampu menyentuh akar konflik yang sesungguhnya. Hal tersebut jelas “ibarat api dalam sekam” yang setiap saat bisa meledak dan membakar hangus bangsa ini.

Dengan melihat kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan tersebut, lalu timbul kegelisahan: jangan-jangan meletusnya sejumlah konflik SARA yang berkepanjangan di tanah air – setidaknya untuk lima tahun terakhir – adalah fenomena yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sebuah skenario global pihak tertentu yang menginginkan bangkrutnya Indonesia sebagai sebuah *nation-state* yang utuh. Dalam konteks ini, menarik mengutip analisis disertai pengamat ekonomi-militer CIDES, Didin S. Damanhuri (2000) bahwa “target akhir dari skenario global di balik rangkaian kerusuhan nasional yang

menghantam Indonesia belakangan ini adalah: tercabiknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi dua belas potong negara." Jika analisis tersebut benar, maka jelas ia merupakan *warning* yang sangat keras, khususnya bagi mereka yang masih bermimpi tentang Indonesia Baru yang lebih demokratis, beradab, cinta kedamaian dan menolak tegas konflik dan kekerasan. Dari dasar pemikiran ini pula dipandang perlu memikirkan upaya sadar dan sistematis guna melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas dan bening yang secara sungguh-sungguh berkhidmat kepada upaya melahirkan perdamaian dan resolusi konflik di tanah air.

Kepulauan nusantara merupakan ajang pertemuan dari agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama besar tersebut tidak terlepas dari letak geografis kepulauan nusantara di dalam perdagangan dunia sejak abad permulaan. Tidak mengherankan apabila pengaruh-pengaruh penyebaran agama Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen, serta agama-agama lainnya terdapat di Kepulauan Nusantara. Setiap sub etnis di Indonesia mempunyai kebudayaan sendiri. Kebudayaan berjenis-jenis etnis tersebut bukan hanya diperlihara dan berkembang di dalam teritori di mana terjadi konsentrasi etnis tersebut tetapi juga telah menyebar di seluruh Nusantara.

Membangun masyarakat multi etnis dan budaya seperti Indonesia menuntut suatu pandangan baru mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia yang dilahirkan sejak kebangkitan nasionalis telah mengalami perubahan-perubahan di dalam perkembangan yang berikutnya, khususnya di era reformasi, meminta suatu rumusan baru mengenai nasionalisme Indonesia di dalam membangun suatu *nation state* yang multikultural, khususnya yang diimplementasikan melalui pendidikan nasional. Pandangan baru atau rumusan kembali mengenai nasionalisme Indonesia perlu didukung oleh warga negara Indonesia yang cerdas dan bermoral. Suatu masyarakat yang pluralistis dan multikultural tidak mungkin dibangun tanpa adanya manusia yang cerdas dan bermoral.

Pertanyaannya kemudian: yang muncul kepada kita ialah bagaimana membangun Indonesia yang cerdas dan bermoral di dalam masyarakat yang demokratis dan aneka. Tugas ini hanya dapat dibangun melalui perubahan sikap dari setiap insan Indonesia. Perubahan sikap merupakan hasil dari suatu pembinaan, yaitu melalui pendidikan yang berdasarkan kepada asas-asas demokrasi dan multikultural.

II. Pendidikan Multikultural

1. *Substansi Pendidikan Multikultural*

James Banks dapat dipandang sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia mengandaikan bahwa peserta didik harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge*

construction) dan interpretasi yang berbeda-beda (Banks, 1993). Di titik ini, peserta didik harus dibiasakan menerima perbedaan.

Selanjutnya Banks (2001) berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Banks, 1993).

Sementara itu, Howard (1993) berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberi kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan peserta didik, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturenya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku); *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas).

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik (Farida Hanum, 2005). Hal tersebut ditekankan pula oleh Musa Asya'rie (2004) yang mengandaikan pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan: cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Multikultural

Sedikitnya dalam pendakuan Parekh (1997), multikulturalisme meliputi tiga hal. *Pertama*, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; *kedua*, merujuk pada keragaman yang ada; dan *ketiga*, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran "isme" menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan.

Satu hal yang mendasar, perbedaan-perbedaan pada diri peserta didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11). Melalui pendidikan multikultural ini peserta didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu: (a) ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, (b) gerakan pembaharuan pendidikan, dan (c) proses.

a. Kesadaran Nilai Penting Keaneka-an Budaya

satu hal yang mesti dicatat bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik khusus dan tipikal: usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural, karena itu, berkaitan erat dengan ide bahwa semua peserta didik tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada, karena itu, merupakan keniscayaan yang mesti diterima sebagai anugerah Tuhan.

b. Gerakan Pembaharuan Pendidikan

Ide penting lain dalam pendidikan multikultural adalah sebagian peserta didik karena karakteristiknya, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedang peserta didik dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu.

Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok untuk mendapat pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh segolongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh golongan yang lain. Ada kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk dalam kelompok sekolah favorit itu.

Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Sebagaimana ditunjukkan oleh Grant dan Seleeten (dalam Sutarno, 2007), pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual atau bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek-aspek pendidikan.

c. Proses Pendidikan

Pendidikan multikultural yang juga mengandaikan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terealisasi secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi, proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung tercapai. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh bukan sekedar meningkatkan skor.

Persamaan pendidikan, seperti halnya kebebasan dan keadilan, merupakan ide yang harus dicapai melalui perjuangan keras. Perbedaan ras, gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada, sekalipun telah ada upaya keras untuk menghilangkan masalah ini. Jika prasangka dan diskriminasi dikurangi pada suatu kelompok, biasanya keduanya terarah pada kelompok lain atau mengambil bentuk yang lain. Karena tujuan pendidikan seharusnya bekerja secara kontinyu meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua peserta didik.

Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan multikultural, saat ini telah mengalami perubahan jika dibandingkan konsep awal yang muncul pada tahun 1960-an. Beberapa di antaranya membahas pendidikan multikultural sebagai suatu perubahan kurikulum, mungkin dengan menambah materi dan perspektif baru. Yang lain berbicara tentang isu iklim kelas dan gaya mengajar yang dipergunakan kelompok tertentu. Yang lain berfokus pada isu sistem dan kelembagaan seperti jurusan, tes baku, atau ketidakcocokan pendanaan antara golongan tertentu yang mendapat jatah lebih, sementara yang lain kurang mendapat perhatian. Sekalipun banyak perbedaan konsep pendidikan multikultural, ada sejumlah ide yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi pemahaman pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar-budaya.
- 2) Persiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi peserta didik secara efektif, tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya.
- 3) Partisipasi sekolah dalam menghilangkan kekurangpedulian dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan kekurangpedulian di sekolahnya sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis.
- 4) Pendidikan berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan aspirasi dan pengalaman peserta didik.
- 5) Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan bimbingan, materi pendidikan, serta buku teks.

III. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Kenyataan historis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam dan tinggal di wilayah pulau-pulau yang tersebar berjauhan. Dalam Deklarasi Djoeanda, laut Indonesia seluas 5,8 km², di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (Prakoso B.P., 2008: 1). Hal ini menyebabkan interaksi dan integrasi tidak selamanya dapat berjalan lancar. Demikian pula kemajuan ekonomi sulit merata, sehingga terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, ini sangat rentan sebagai awal rasa ketidakpuasan yang berpotensi menjadi konflik.

Kondisi tersebut di atas dilengkapi pula dengan sistem pemerintahan yang kurang memperhatikan pembangunan kemanusiaan pada era terdahulu, kebijakan negara Indonesia didominasi oleh kepentingan ekonomi dan stabilitas nasional. Sektor pendidikan politik dan pembinaan bangsa kurang mendapat perhatian. Pada saat itu, masyarakat takut berbeda pandangan, sebab kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak mendapat tempat; kebebasan berpikir ikut terpasung; pembinaan kehidupan keragaman nyaris berada pada titik nadir.

Gerakan reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil yang oleh Eskstrand (dalam Nasikun, 2005) disebut sebagai perspektif multikulturalisme radikal (*radical multiculturalism*) sebagaimana yang kini telah diakomodasi oleh Undang-Undang Sisdiknas. Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang dan pendidikan multikultural justru sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Pendidikan multikultural sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

IV. Masalah Pendidikan Multikultural di Indonesia

Seperti diungkapkan sebelumnya jika SARA sejatinya adalah “ibu kandung” dan sebagai unsur utama yang mempersatukan bangsa ini dan bukan dijadikan alasan terjadinya konflik. Dalam studi sosial, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai, merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme.

Kesadaran akan pentingnya kepelbagaian mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara, yang dikritik karena dianggap terlalu menekan kesatuan daripada keanekaan yang acap kali terabaikan.

Bertolak dari kenyataan itu, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Dari kebijakan itu nantinya diharapkan masyarakat dapat mengelola perbedaan yang ada secara positif. Dengan demikian, perbedaan dalam beragam area kehidupan tidak memicu prasangka atau konflik tetapi sebaliknya mendorong dinamika masyarakat ke

arah lebih baik. Namun demikian, problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat memicu munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Keaneka-an Budaya Etnik

Keaneka-an ibarat pisau bermata dua: modal sekaligus potensi konflik. Keaneka-an budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antarbudaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Misalnya peristiwa Sampit. Mengapa? Keragaman ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu yang memancing persoalan.

Dalam mengantisipasi hal itu, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi.

2. Pergeseran Paradigma Kekuasaan: Desentralisasi

Ada sejumlah tantangan yang dialami Indonesia—dengan tingkat keajekan yang demikian tinggi—menyusul ledakan reformasi dan demokratisasi. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam *habitus* budaya, akibat paradigma kekuasaan desentralisasi, membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan, sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan.

Konsep “putra daerah” atau “asli daerah” untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun bila isu itu terus menerus dihembuskan

justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang akan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi (misalnya iri, keinginan memperoleh jabatan) dapat berubah menjadi isu publik yang destruktif ketika persoalan itu muncul di antara orang yang termasuk dalam putra daerah dan pendatang.

Fenomena “pemekaran wilayah” baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang marak terjadi akhir-akhir ini selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung.

3. *Rapuhnya Ruang Kebangsaan Kita*

Paham kebangsaan lahir bukan untuk mengusung kepentingan ras, agama, komunitas, atau etnik tertentu melainkan untuk “sesuatu yang dibayangkan,” begitu pendakuan Benedict Anderson dalam *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* (1983). Bangsa adalah sebuah komunitas yang “dibayangkan” karena, pada intinya, mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Meski mereka tidak saling jumpa secara fisik dan tak saling mendengar tentang mereka secara seksama, namun di dalam benak masing-masing terdapat keterkaitan emosional sebagai *comradeship* yakni, “semangat persaudaraan yang membentang secara horizontal.”

Tesis Anderson laksana “mantra” dalam kehidupan keindonesiaan kita yang kerap diterjang konflik sosial yang meledak karena disulut isu SARA. Di sini kisruh SARA jadi “mimpi buruk” bagi imajinasi setiap warga tentang Indonesia. Itu sebab, penyerangan dan pembubaran paksa kebaktian umat Katolik di Sleman Yogyakarta belum lama ini, dapat dinilai sebagai amarah yang dapat merobek “ruang” kebangsaan kita, justru di tengah persiapan menghadapi Pilpres 2014.

Semiotika adalah ilmu yang melihat ruang (*space*) sebagai tanda yang diberi makna oleh manusia. Dalam kehidupannya, ruang juga diberi fungsi tertentu oleh manusia sebagai tempat (*place*). Di titik ini, kita kemudian mengenal ruang dan tempat publik, privat, suci, dan juga ruang kebangsaan.

Danesi dan Perron, *Analyzing Culture* (1999) meletakkan jejak ikhwal tentang ruang. Dari titik ini pula kita coba mengaji “ruang” kebangsaan. Secara semiotik, ada tiga variabel pada konsep ruang: (1) “teritorialitas”, (2) “kepanjangan diri” (*extension of self*), (3) “konotasi sosial”.

Teritorialitas melihat “ruang” sebagai habitus yang bersifat obyektif dan karena itu punya katup primordial seperti etnik, kelompok dan wilayah, yang dalam pendakuan Barthes disebut *denotasi*. Dalam konteks kebangsaan, fase ini disebut kesadaran “aku-teritorial” yang memungkinkan munculnya *ethno-nationalism* sebagai kohesi kelompok di tahun 1928 seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks, Jong Celebes, dan Pemoeda Kaoem Betawi.

Ruang kebangsaan sebagai “kepanjangan diri” (*extension of self*) adalah fase lebih lanjut dari kesadaran “aku-teritorial” yang mengandaikan sebuah kesadaran diri yang melampaui sekat-sekat primordial dan melenting pada tujuan yang “lebih tinggi” ke tingkat *nation-state*. Kesadaran inilah yang kelak meledakkan revolusi 17 Agustus 1945. Ruang sebagai *extension of self*, oleh Barthes menyebutnya gejala *konotasi*.

Kini ruang kebangsaan kita tengah diguncang globalisasi yang mengandaikan interkoneksi yang serba melintasi dan tanpa sekat (*borderless*). Relasi antar bangsa menjadi *global society*: pesona *global market* tumbuh laksana lengan-lengan raksasa yang merengkuh kehidupan kita dan *cyber space* menjadi pola baru relasi sosial. Di titik ini, percakapan tentang ruang kebangsaan menjadi gagap, genting dan rapuh.

4. *Culrural Bleeding versus Multikultural*

Ada sebilah kegalauan yang diembuskan Anthony Giddens, “dunia yang kita diami adalah ‘dunia tunggang langgang’ (*runaway world*) yang diibaratkan truk raksasa: memuat banyak hal, berjalan *zig zag*, berputar-putar di situ-situ saja, entah ke mana.” Sebagai pemikir “Jalan Ketiga” Giddens menilai: akhir-akhir ini, dunia tengah terjerumus ke dalam pusaran aneka kekerasan. Itu sebab, perasaan kita kini terkepung dalam “lingkar setan di antara geram dan tersengat.”

Dalam *Cultural Studies*, sedikitnya dikenal dua teori untuk menata dunia. *Pertama*, “Teori Struktur” yang mengidolakan struktur, tapi mengabaikan aspek primordial-diri dan menghancurkan kebebasan individu. *Kedua*, “Teori Peran”, yang mengandaikan kiprah individu, tapi menampik kebaikan publik dan kebaikan sosial (*social virtue*).

Dalam perjalanannya, aplikasi kedua teori tersebut melahirkan tiga dentuman. *Pertama*, “globalisasi” sebagai arus utama yang digerakkan oleh kekuatan inovasi besar: komunikasi, transportasi, dan internet. *Kedua*, “detradisionalisasi” sebuah kondisi di mana *tradisi* tidak lagi dijadikan sebagai acuan manusia-manusia etnik lalu berpaling dari tradisi kehidupan bersama. *Ketiga*, “refleksi sosial” dimana manusia-manusia etnik memilih jalan sendiri dan mengambil keputusan sendiri-sendiri secara individu.

Apa yang digelisahkan Giddens, memiliki pijakan empiriknya di Indonesia. Belakangan ini, bangsa kita tengah dilanda *cultural bleeding*, konflik pendarahan akut di antara perjumpaan budaya-budaya etnik. Sebagai contoh: kampus-kampus di sejumlah kota besar di tanah air, khususnya di Makassar, yang sejauh ini diyakini sebagai pusat transformasi nilai utama, justru menjadi “wadah persemaian” kekerasan berdarah yang dipicu atas nama “etnik”. Di sana, dengan entengnya nyawa manusia melayang. Di tingkat nasional, peristiwa “Sampit Berdarah” dan “pengusiran” orang-orang Bugis Makassar di Bumi Tarakan beberapa saat silam—sekedar menunjuk beberapa di antaranya—kian meneguhkan keberadaan *cultural bleeding*. Kini, dalam formula negatif, kelompok etnik amat mudah membentuk laskar-laskar. Jika ini dibiarkan, negeri ini kelak akan menjadi “bangsa laskar.” Sementara, fenomena *venalitas*, yakni bermainnya politik uang dalam kekuasaan akibat

“Jakartanisasi” tidak saja mengguncang situasi tunggang langgang budaya etnik tapi juga kian memperkeruh wajah buram kebangsaan kita. Di sini, Jakarta menjadi kiblat pasar dan memosisikan dirinya sebagai “pusat kesadaran baru” yang cenderung menyeragamkan sembari menampik aspek unik primordialisme dan bangunan keanekaan bangsanya.

Situasi ini mengandaikan “kehadiran” negara, setidaknya untuk membuka ruang yang sejauh ini tertutup rapat: “*negotiated power*” yakni kekuasaan yang bisa dinegosiasi untuk meniadakan *ketidakadilan atas etnik*. Di samping itu, negara juga patut mengembangkan “percakapan demokrasi” bahwa demokrasi bukan milik parlemen dan politisi semata, bukan juga milik oligarki dan kaum ‘bos’, tapi milik setiap warga negara.

5. *Ketidak Adilan Ekonomi: Akar Sejumlah Konflik*

Kejadian dengan aroma SARA demikian kental seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata dipicu oleh kecemburuan sosial yang melihat warga “pendatang” memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga “asli”. Di sini tampak jelas jika sejumlah peristiwa “berdarah” di tanah air yang melibatkan sentimen etnis dan juga agama justeru dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi yang timpang dan tidak adil.

Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini, apapun kejadian dan tema demonstrasi, seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Bahkan ada yang demi selebar kertas duapuluh ribu orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksudnya. Sudah banyak kejadian yang terungkap di media massa mengenai hal ini.

Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkhis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Hal ini nampak dari gejala perusakan mobil-mobil mewah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam berbagai peristiwa di tanah air ini. Mobil mewah menjadi simbol kemewahan dan kemapanan yang menjadi kecemburuan sosial bagi kelompok tertentu sehingga akan cenderung dirusak dalam peristiwa kerusakan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita jumpai mobil mewah yang dicoreti dengan paku ketika mobil itu diparkir di daerah tertentu yang masyarakatnya banyak dari kelompok tertindas ini.

V. Perspektif dan Tujuan Pendidikan Multikultural

Meminjam sistem klasifikasi Robinson, Nasikun (2005) menyampaikan bahwa ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan: (1) perspektif “*cultural assimilation*”; (2) perspektif “*cultural pluralism*”; dan (3) perspektif “*cultural synthesis*”. Yang pertama, merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subyek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub nasional ke

dalam suatu "core society". Yang kedua, suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Yang ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional. Selanjutnya Nasikun berpendapat bahwa di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini yang diperlukan adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan yang ketiga. Perspektif pendidikan yang demikian memberi peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan bagi promosi terbentuknya suatu "melting pot" dari beragam kebudayaan dan masyarakat sub nasional.

Pilihan perspektif pendidikan "sintesis multikultural" memiliki rasional yang paling dasar di dalam hakekat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi melalui tiga tujuan (Ekstrand dalam Nasikun, 2005), yaitu tujuan "attitudinal", tujuan "kognitif", dan tujuan "instruksional". Pada tingkat attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan mis-informasi tentang kelompok-kelompok etnis dan kultural yang dimuat di dalam buku dan media pembelajaran, menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, mengembangkan ketrampilan-ketrampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi dan membentuk menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.

VI. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural

Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing Negara. Banks (1993) mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

1. Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari

gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan/pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia.

2. Pendekatan aditif (*aditif approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif.

Pendekatan aditif sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural, sebab belum menyentuh kurikulum utama.

3. Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar peserta didik dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Peserta didik diajarkan melihat dari perspektif yang lain. Banks (1993) menyebut ini sebagai proses *multiple acculturation*, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (*multiple acculturation conception*) dari masyarakat dan budaya Negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, music, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar.

4. Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*) mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan peserta didik membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik peserta didik melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat peserta didik dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu peserta didik menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Peserta didik memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok-kelompok etnis, ras dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

VII. Implementasi Pendidikan Multikultural di Kelas

Empat pendekatan yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilakukan untuk mengintegrasikan materi multikultural ke dalam kurikulum ke dalam kurikulum dan dapat dipadukan dalam situasi pengajaran yang aktual

dalam semua mata pelajaran. Memang dalam hal ini lebih mudah diimplementasikan pada pelajaran yang berkaitan dengan sosial budaya. Pendekatan kontribusi, dapat dipakai sebagai wahana bergerak ke tahap yang lain yang lebih menantang secara intelektual seperti pendekatan transformasi dan aksi sosial. Hal ini disesuaikan pula dengan jenjang pendidikan dan umur peserta didik, seperti (Farida Hanum, 2009):

1. Implementasi pendekatan kontribusi di kelas

Pada peserta didik TK dan SD kelas bawah (kelas I, II, III) implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan pendekatan kontribusi, antara lain dengan cara:

- a. Mengenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda.
- b. Mengajak peserta didik untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian.
- c. Mendengarkan pada peserta didik lagu-lagu daerah lain.
- d. Menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku bangsa maupun dari negara lain.
- e. Mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri.
- f. Menunjukkan tempat-tempat dan cara ibadah yang berbeda.
- g. Meminta peserta didik yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan di keluarga luasnya.
- h. Mengenalkan beberapa kosa kata yang penting yang berasal dari suku bangsa atau negara (ras) lain, misalnya: matur nuwun (Jawa), muliate (Batak), Thank You (Inggris), Kamsia (Cina), dan sebagainya.
- i. Mengenalkan panggilan-panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya: upik (Padang), ujang (Sunda), Koko (Cina), dan sebagainya.

Substansi pendidikan multikultural pada tahap ini adalah menanamkan pada peserta didik bahwa manusia yang hidup di sekitarnya dan di tempat lain serta di dunia ini sangat beragam. Sebenarnya semua nilainya sama. Sama-sama rumah, makanan, lagu, berpakaian, tokoh, ibadah, perkawinan, maksud kata, dan sebagainya. Dengan demikian peserta didik mulai mengerti bahwa ada cara yang berbeda tetapi maksud dan nilainya sama. Sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan dengan proses rasa yang menyenangkan. Akhirnya peserta didik merasa berbeda itu bukanlah masalah tetapi anugerah.

2. Implementasi pendidikan aditif di kelas

Peserta didik SD kelas atas (IV, V, VI) dan SMP sudah mulai mampu memahami makna, maka pendekatan aditif tepat untuk diberikan, seperti:

- a. Melengkapi perpustakaan dengan buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah dan negara lain.
- b. Membuat modul pendidikan multikultural untuk suplemen materi pelajaran yang lain. Seperti Modul Pendidikan Multikultural untuk suplemen pendidikan IPS kelas IV (Farida Hanum dan Setya Raharja, 2006).

c. Memutarakan CD tentang kehidupan di pedesaan, di perkotaan dari daerah dan negara yang berbeda.

d. Meminta peserta didik memiliki teman korespondensi/email/facebook atau sahabat dengan peserta didik yang berbeda daerah, negara atau latar belakang lainnya.

e. Guru menceritakan pengetahuan dan pengalamannya tentang materi di daerah atau negara lain. Misalnya: guru IPA menjelaskan tentang macam-macam tanaman, hewan. Guru bahasa Indonesia menceritakan tentang penyair. Guru IPS menjelaskan tentang sejarah bangsa, dan lain-lain.

f. Dalam setiap materi pembelajaran guru seyogianya mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan menerapkannya di kelas.

Hal ini dilakukan untuk menanamkan pengetahuan yang luas bagi peserta didik. Rasa ketertarikan akan keragaman yang diperoleh di dalam kelas akan memotivasi peserta didik untuk tahu lebih banyak dengan membaca, melihat di internet, berkunjung, bertanya pada yang lebih tahu, dan sebagainya. Dengan wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, pengetahuan, peserta didik akan tumbuh menjadi orang yang inklusif, mudah menerima yang berbeda, toleran dan menghargai orang lain. Selain itu mudah berinteraksi dengan lingkungan yang baru ataupun yang kompleks.

3. Implementasi pendekatan transformasi di kelas

Pada peserta didik sekolah lanjutan implementasi pendidikan multikultural dapat dipakai pendekatan transformasi. Peserta didik pada jenjang ini sudah mampu memiliki sudut pandang. Mereka mampu melihat konsep, isu, tema dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pada diri mereka sudah tertanam nilai-nilai budayanya. Jadi mereka dapat berkompetisi dan beradu argumentasi sertamulai berani melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dalam dialog dan argumen akan terjadi interaksi yang saling memperkaya wawasan, yang oleh Bank (1993) disebut proses *multiple acculturatiuon*. Sehingga dapat tumbuh dan tercipta sikap saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama yang dirasakan melalui pengalaman belajar. Proses ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Bila membentuk kelompok diskusi tiap kelompok seyogianya terdiri dari peserta didik yang berbeda latar belakang seperti kemampuan, jenis kelamin, perangai, status sosial ekonomi, agama, agar mereka dapat saling belajar kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Peserta didik dibiasakan untuk berpendapat dan berargumentasi yang sesuai dengan jalan pikiuran mereka. Guru tidak perlu khawatir akan terjadi konflik pendapat ataupun SARA.

c. Guru dapat mengajak peserta didik untuk berpendapat tentang suatu kejadian atau isu yang aktual, misalnya tentang bom bunuh diri atau kemiskinan, biarkan peserta didik berpendapat menurut pikirannya masing-masing.

d. Membiasakan peserta didik saling membantu pada kegiatan keagamaan yang berbeda.

e. Membuat program sekolah yang mengajak peserta didik mengalami peristiwa langsung dalam lingkungan yang berbeda, seperti *lifestay*. Pada liburan peserta didik diminta untuk tinggal di keluarga yang latar belakangnya berbeda dengan mereka, misalnya berbeda etnis, status sosial ekonomi, agama, bahkan kalau mungkin ras atau negara.

f. Mengajak peserta didik untuk menolong keluarga-keluarga yang kurang beruntung ataupun berkunjung ke tempat orang-orang yang malang dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan ras.

g. Melatih peserta didik untuk menghargai dan memiliki hal-hal yang positif dari pihak lain.

h. Melatih peserta didik untuk mampu menerima perbedaan, kegagalan, dan kesuksesan.

i. Memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari, memotret kehidupan nyata dan kegiatan tradisi dari etnis, agama, wilayah, budaya yang berbeda. Pengalaman pembelajaran di atas dapat melatih peserta didik bersikap sportif terhadap kelebihan dan kekurangan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Peserta didik juga dilatih mampu menghargai, mengakui, dan mau mengambil hal-hal positif dari pihak lain walaupun itu dari kelompok minoritas di kelas atau negara kita. Sehingga ada proses transformasi dan proses akulturasi antar peserta didik. Hal ini juga melatih peserta didik menjadi orang yang terbuka, *positive thinking* dan berjiwa besar, sehingga tidak mudah berprasangka, menuduh, dan memberi label pada kelompok lain.

4. Implementasi pendekatan aksi sosial

Dalam tahap aksi sosial, peserta didik sudah diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu atau masalah yang diberikan kepada mereka. Karena tujuan pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik peserta didik mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik.

Dalam arti peserta didik tahu tentang permasalahan yang terjadi, menganalisis kelemahan dan kekuatan yang ada serta mampu memberi alternatif pemecahan dengan melakukan solusi pemecahannya.

Aksi sosial ini lebih tepat dilakukan di perguruan tinggi, baik dilakukan untuk kegiatan pembelajaran di kelas atau di organisasi kemahasiswaan, antara lain:

a. Mengkaji kebijakan yang dianggap kurang efektif, kurang humanis, kurang adil, diskriminatif dan berbias jender.

b. Melakukan protes dan demonstrasi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap ketidakadilan.

c. Memberi dukungan nyata pada pihak yang dirugikan.

d. Membuat jaringan kerja antardaerah dan negara untuk berbagai isu yang aktual.

e. Melakukan kegiatan bersama antara daerah dan bangsa untuk kemajuan bersama tanpa melihat latar belakang yang berbeda.

f. Menjalin persahabatan tanpa dibatasi perbedaan apapun.

g. Memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk pihak-pihak yang berbeda budaya, agama maupun ras.

h. Mampu memiliki anggapan bahwa kita adalah bagian dari manusia yang ada di bumi ini tanpa membedakan latar belakang budaya, negara dan agama (*we are the world*).

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menyiapkan peserta didik (mahapeserta didik) untuk memiliki pengetahuan, nilai, keterampilan bertindak dan peran aktif dalam perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional, dan global. Dalam pendekatan ini guru/dosen berperan sebagai agent of social change (perubahan sosial) yang meningkatkan nilai-nilai demokratis, humanis, dan kekuatan peserta didik.

Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di kelas banyak bergantung pada peran dan kemampuan guru dalam multikulturalisme. Ada beberapa petunjuk yang dapat membantu guru, antara lain:

1. Sensitiflah dengan sikap, perilaku rasial, stereotipe, prejudice, labelling anda, serta pernyataan-pernyataan yang anda buat tentang kelompok etnis lain. Hindari pernyataan seperti orang Cina pelit, orang Jawa manutan, peserta didik kelas bawah memang sulit maju dan sebagainya.

2. Perluas pengetahuan guru tentang kehidupan masyarakat lain yang berbeda latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Ini sangat diperlukan guru untuk lebih efektif dengan pendekatan multikultural.²²

3. Yakinkan bahwa kelas anda membawa citra positif tentang berbagai ragam perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan nyata seperti majalah dinding, poster, kalender yang memperlihatkan perbedaan ras, jender, gama, status sosial ekonomi, sehingga peserta didik terbiasa melihatnya.

4. Sensitiflah pada perilaku, sikap peserta didik anda yang rasial, bimbang dan yakinkan mereka agar dapat menerima perbedaan sebagai hal wajar dan anugerah yang memperkaya budaya manusia.

5. Gunakan buku, film, video, CD, dan rekaman untuk melengkapi buku teks, agar dapat memperkaya pengetahuan peserta didik tentang keragaman budaya yang ada di masyarakat di tanah air maupun di dunia.

6. Ciptakan iklim berbagi pada peserta didik dengan memberi kesempatan peserta didik menceritakan pengalaman pribadi tentang budaya mereka maupun budaya lain yang mereka ketahui.

7. Gunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi sosial di kelas dan di sekolah, waspada bila terjadi kelompok-kelompok yang eksklusif.

VIII. Penutup

Di Indonesia pendidikan multikultural masih relatif masih belum dikenal sebagian besar guru-guru. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pendidikan multikultural penting untuk terus dilakukan, baik yang berbentuk seminar, penataan, workshop, curah pendapat maupun penyediaan buku-

buku penunjang. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Pancasila dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang secara puitik dapat dimaknai: Betapa indahny persatuan, justeru karena kita terlanjur berbeda.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1999. *Bahasa Nusantara: Posisi dan Perkembangannya di Abad ke-21*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , "Masalah Kebudayaan dalam Pembangunan" dalam Jurnal *Humaniora*, Vol. XV.
- Arief, Sritua. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik*, Jakarta: UI Press.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1979. *The Social Construction of Reality*, New York: Penguin Books.
- Baker G.C. 1994. *Planning dan Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). California: Addison-Elsey Publishing Company.
- Banks, James A. 1993. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn andBacon.
- Cherry A McGee Banks (editor). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*, 2nd Edition. San Fransisco: Jossey Bass.
- Farida Hanum. 2005. *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahapeserta didik Aktivois UNY*. Laporan Penelitian. Lemlit UNY.
- , dan Setya Raharja. 2006. *Pengembangan Model dan Modul Pendidikan Multikultural di SD. (Sebagai suplemen Mata Pelajaran IPS)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Lemlit UNY.
- , 2009. "Classroom Practice in A Multicultural Context". Paper Presentation in International Seminar on Multiculturalism And (Language and Art) Education.
- "Unity and Harmony in Diversity". Yogyakarta State University 21-22 October 2009.
- Gollnick, M.Donna, and C. Philip Chinn. 1998. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- H.A.R Tilaar. 2004. *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

- Hasyim Djalal. 2007. *Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Pokok-Pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Haviland, William A. 1998. *Antropologi 2*. Terj. Jakarta: Airlangga.
- Lawrence, E. Harrison and Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Murrell, P. 1991. "Cultural Politics in Teacher Education: What is missing in the preparation of minority teachers?" In M. Foster, ed., *Reading on Equal Education*, vol. 11: Qualitative Investigation into Schools and Schooling, 2005-225. New York: AMS.
- Musa Asy'arie. 2004. "Pendidikan Multikultural dan Konflik 1-2". www.kompas.co.id.
- Nasikun. 2005. "Imperatif Pendidikan Multikultural di Masyarakat Majemuk". *Makalah* Disampaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Sabtu, 8 Januari 2005 di Ruang Seminar FE UMS.
- Prakoso Bhairawa Putra. 2008. *Strategi Pemeliharaan Batas Wilayah Melalui Penguatan Pengelolaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Terluar*. *Inovasi Online*, vol. 12/xx/Nov. 2008. <http://cc.msnsnscache.com/cache.aspx?q>.
- Ross, Mac Howard. 1993. *the Culture of Conflict: Interpretation and Interest in Comparative Perspective*. Connecticut: Yale University Press.
- Soedjatmoko. 1996. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo, Evi Nurvida Arifin. 2003. *Penduduk Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Ditjen Dikti.